KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

	M.	*** *********************************							
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2					H.4 X Final H.5 Tidak Final	
A. IDE	NTITAS PE	NERIMA PENGHASIL	AN YANG	G DIPOTONG					
A.1 NPWP : 7 9 8 9 3 2 3 1 5 7 2 4 0 0 0									
A.2 NIK :									
A.3 Nama : JAUHARIYATUL ANWARIYAH, AMD. KEP.									
B. PP	h PASAL 21	YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK KODE OBJ		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.2	B.3		B.4	B.5	B.6	B.7	
5 21-402-01		21-402-01	8.355.000		8.355.000	0	5	417.750	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen									
	Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 1 dd 0 5						5 mm	2 0 2 2 yyyy	
B.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor: Tanggal dd mmyyyy							уууу		
B.10	.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK									
C.1	NPWP Instar	nsi Pemerintah :	9 5	3 3 5 0	162722	0 0 0			
C.2									
C.3 ID Subunit Organisasi :				ППППП					
C.4	C.4 Tanggal :		1 1	1 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan :		RIANI	RIANDY						
				n ini saya menyatakan ba angani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	utan Unifikasi telah s	saya isi dengar	ı benar dan telah saya	
				i dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	l berlaku, Direktorat Jenderal Paja ukan tanda tangan.	k mengatur bahwa d	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	

IK17L8A7